

**PENGELOLAAN POTENSISUMBERDAYA  
KELAUTAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN  
(Studi Kasus *Community-Based Management* Wilayah Pesisir  
di Kabupaten Tuban)**

**Shofwan**

**Moh. Khusaini**

**Nurul Badriyah**

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

***ABSTRACT***

*The objectives of this research were to analyze Community-Based Management application, influence and factors to management of coastal resources especially increasing fisherman income on 5 districts in sub-province Tuban. The results showed there are extensive community participation, capacity building and village coastal management plans. These plans are significant in many ways. Planning is also underway to scale-up from pilot sites to a provincial program that provides technical and financial support services to village government and communities coast-wide.*

***Keywords:*** *Community-Based Management, Coastal Resources, Coastal Village, Fisherman Income*

## **A. LATAR BELAKANG**

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai kurang lebih 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas karang lebih dari 3,1 juta km<sup>2</sup>. Wilayah pesisir yang merupakan sumber daya potensial di Indonesia adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini sangat besar yang didukung oleh adanya garis pantai sepanjang itu (Dahuri et al. 2001). Garis pantai yang panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumber alam yang besar. Potensi itu diantaranya potensi hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya: perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi non-hayati misalnya, mineral dan bahan tambang serta pariwisata.

Permasalahan utama yang sering terkait dengan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir adalah lemahnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kelautan dan wilayah pesisir. Munculnya masalah tersebut disebabkan lemahnya sistem dan tata cara koordinasi antar stakeholder karena belum didukung dengan adanya sistem hukum yang mengatur kegiatan tersebut. Selain itu, lemahnya koalitas sumberdaya manusia mempengaruhi proses partisipatif menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sering berdampak pada munculnya ketidaksepahaman dan konflik penggunaan ruang antar stakeholder dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sumberdaya alam yang berada disekitar wilayah pesisir dan laut

Sejak era reformasi, pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan mulai mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Perhatian ini dituangkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk propinsi dan 4 mil untuk kabupaten. Peraturan ini memberikan peluang besar bagi pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat dan juga memberikan peluang

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengelola secara bersama (co-management) wilayah tersebut.

Pengelolaan berbasis masyarakat atau *Community-Based Management* (CBM) atau juga co-management menurut Nikijuluw (1994) dalam Zamani dan Darmawan (2000), merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu, mereka juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya (*religion*). Carter (1996) dalam Zamani dan Darmawan (2000) juga, memberikan definisi sebagai: “*A strategy for achieving a people-centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area*” atau “Suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada ditangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut”.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat adalah pendekatan pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah dalam bentuk pengelolaan secara bersama dimana masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaannya.

Berdasarkan kasus menarik tersebut, studi ini berupaya untuk menguji secara sistematis penerapan pengelolaan potensi sumberdaya kelautan berbasis masyarakat di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Tuban yang dilewati garis pantai sepanjang 65 km terdiri atas kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang perikanan berupa penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran. Kondisi makro pembangunan di 5 kecamatan di atas memberikan gambaran singkat mengenai hasil pembangunan dan aspek-aspek yang berkaitan pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis praktek praktek pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat (*Community-Based Management/CBM*) di 5 kecamatan di Kabupaten Tuban, khususnya dalam program peningkatan pendapatan nelayan pandega?
2. Menganalisis pengaruh pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat (*Community-Based Management*) terhadap tingkat pendapatan nelayan tersebut?
3. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berjalannya CBM di 5 kecamatan tersebut?

### **B. KAJIAN TEORITIS**

Kebijakan pembangunan di bidang pesisir dan lautan sebagai kebijakan strategis diharapkan dapat membawa kemakmuran rakyat, mengembangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia serta mampu mensejajarkan diri dengan komunitas negara maju didunia. Kebijakan tersebut didasarkan pada obyektivitas ilmiah (*scientific objectivity*) yang dibangun berdasarkan asas partisipatif dan diarahkan agar rakyat sebagai penerima manfaat terbesar.

Menurut Feyereban diperlukan suatu *multiple epistemology* dalam memahami pemikiran pembangunan yakni menggabungkan tradisi abstrak yang didominasi pemikiran barat dengan tradisi historis yang menjadi ciri utama negara-negara sedang berkembang. Namun, karena posisi epistemologi lokal ini semakin melemah dan tersingkir, meskipun telah terbukti mampu menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakatnya, maka perlu ditemukan metode atau upaya untuk memperkuat posisinya dalam perkembangan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan termasuk

---

pembangunan sektor kelautan. Penguatan pengetahuan lokal mensyaratkan redefinisi dari pembangunan sektor kelautan sebagai sebuah epistemologi baru guna menunjang otonomi daerah di wilayah pesisir dan lautan. Pembangunan sektor kelautan yang semacam ini dimana pengetahuan lokal menjadi landasan utama mensyaratkan adanya cirri-ciri endogen dari pembangunan tersebut.

Ciri-ciri endogen tersebut dijelaskan oleh Friberg dan Hettne dalam Kusumastanto (2002), yaitu (1) bahwa unit sosial dari pembangunan itu haruslah suatu komunitas yang dibatasi oleh suatu ikatan budaya, dan pembangunan itu harus berakar pada nilai-nilai dan pranatanya; (2) adanya kemandirian, yakni setiap komunitas bergantung pada kekuatan dan sumberdayanya sendiri bukan pada kekuatan luar; (3) adanya keadilan sosial dalam masyarakat dan (4) keseimbangan ekologis, yang menyangkut kesadaran akan potensi ekosistem lokal dan batas-batasnya pada tingkat lokal dan global.

Mempertimbangkan karakteristik masyarakat pesisir, khususnya nelayan sebagai komponen yang paling banyak, serta cakupan atau batasan pemberdayaan maka sudah tentu pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif. Pembangunan yang komprehensif, menurut *Asian Development Bank* (ADB) dalam Nikijuluw (1994), adalah pembangunan dengan memiliki ciri-ciri: (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) secara holistik; dan (5) berkelanjutan.

Pembangunan berbasis lokal adalah bahwa pembangunan itu bukan saja dilakukan setempat tetapi juga melibatkan sumber daya lokal sehingga akhirnya return to local resource dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Dengan demikian maka prinsip daya saing komparatif akan dilaksanakan sebagai dasar atau langkah awal untuk mencapai daya saing kompetitif. Pembangunan berbasis lokal tidak membuat penduduk lokal sekedar penonton dan pemerhati di luar sistem, tetapi melibatkan mereka dalam pembangunan itu sendiri.

Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi. Ini merubah prinsip-prinsip yang dianut selama ini yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan pemenuhan target-target variabel ekonomi makro. Pembangunan komprehensif yang diwujudkan dalam bentuk usaha kemitraan yang mutualistis antara orang lokal (orang miskin) dengan orang yang lebih mampu. Kemitraan akan membuka akses orang miskin terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik, serta pergaulan bisnis yang lebih luas.

Pembangunan secara holistik dalam pembangunan mencakup semua aspek. Untuk itu setiap sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Kebanyakan masyarakat pesisir memang bergantung pada kegiatan sektor kelautan (perikanan), tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang harus bergantung pada perikanan. Akibat dari semua orang menggantungkan diri pada perikanan yaitu kemungkinan terjadinya degradasi sumber daya ikan, penurunan produksi, kenaikan biaya produksi, penurunan pendapatan dan penurunan kesejahteraan. Gejala ini sama dengan apa yang disebut Gordon (1954) dengan tragedi milik bersama.

Berbeda dengan sumberdaya di darat, sumberdaya laut tidak mudah untuk dikotak-kotakan menjadi milik orang atau pribadi. Di sana ada kecenderungan bahwa sumberdaya itu menjadi milik bersama. Karena itu perlindungan dan pengelolaannya akan sulit bila tanpa dukungan dan kerjasama dengan masyarakat dan stakeholder di wilayah pantai tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan CBM mulai dari identifikasi masalah perencanaan, pelaksanaan/implementasi serta monitoring dan evaluasi benar-benar memprioritaskan masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar pantai dan yang mempunyai mata pencaharian dari sumberdaya laut tersebut. Model-model dalam pengembangan CBM merupakan kerangka kerja konsep (*conceptual framework*) dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi Isue
- b. Persiapan Perencanaan
- c. Persetujuan Rencana dan Pendanaan
- d. Pelaksanaan dan Penyesuaian.

Ada tiga tipe pengelolaan daerah pesisir dan pantai yaitu:

**a. *Integrated coastal management (ICM)***

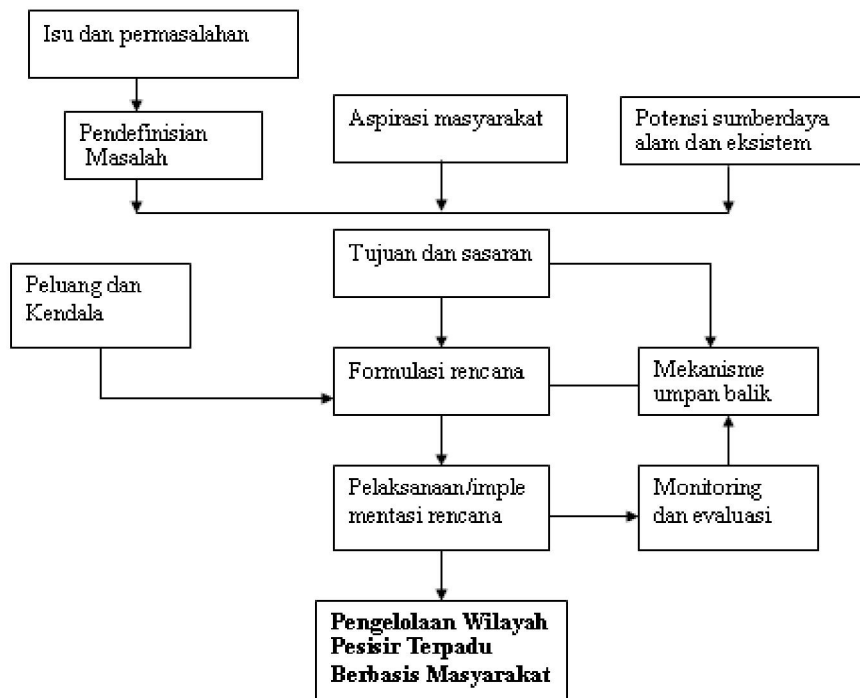
Merupakan pendekatan top-down yang merupakan ciri dari pemerintahan yang sentralistik. Pendekatan ini untuk menguatkan keputusan-keputusan dari otorita pemerintah pusat tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan pantai. ICM ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya mengkaitkan antara aktivitas pembangunan, manusia, proses biofisik dan sektoral dengan lingkungan di sekitar pantai misalnya, tanah di sekitar pantai, sumber-sumber air dan air lepas pantai.

**b. *Community-based coastal resource management***

Berlawanan dengan ICM, ini merupakan pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat setempat yang memanfaatkan sumberdaya laut untuk bertanggungjawab dalam pengelolaannya. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa masyarakat setempat bila dipercaya untuk mengelola maka mereka akan mengelola sumberdaya laut tersebut dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan dengan pembuatan peraturan yang disepakati oleh semua komponen masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini lebih efektif daripada pendekatan top-down.

**c. *Collaborative or Co-Management of Coastal Resources***

Merupakan gabungan antara pengelolaan yang bersifat top-down dengan botto-up. ini menggambarkan realitas yang paling mungkin dengan melibatkan pemerintah lokal (pemda) untuk berbagi tanggung jawab dan kerja sama dalam kemitraan yang dinamis. Kerja sama ini didasarkan pada partisipasi individu dan kelompok yang menguatkan kerangka kerja pengelolaan sumberdaya. Tujuan sosial, budayadan ekonomi tercakup dalam kerangka kerja tersebut. Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab pada semua kebijakan dan koordinasi sementara kelompok-kelompok masyarakat yang menjalankan aktivitas hariannya dalam



**Gambar 1. Kerangka pikir Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Masyarakat Secara Terpadu**

### C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di lima kecamatan di Kabupaten Tuban antara lain . Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Alasan memilih kelima kecamatan ini karena dilewati oleh garis pantai sepanjang 65 km dan kaya dengan hasil-hasil laut seperti cumi-cumi, teri, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya. Selain itu sebagian besar nelayan di Tuban terkonsentrasi di lima kecamatan tersebut.

#### b. Sasaran penelitian

Sasaran dalam penelitian ini meliputi :

- a. Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tuban
- b. Ketua kelompok nelayan di lima kecamatan masing-masing terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan nelayan dan masyarakat sekitar pantai
- c. Beberapa anggota kelompok nelayan di masing-masing kecamatan
- d. Masyarakat yang bukan anggota kelompok nelayan yang tinggal di sekitar pantai
- e. Ibu-ibu yang tinggal di sekitar wilayah pantai

#### c. Metode penelitian

Disadari bahwa kondisi sosial dalam kenyataannya seringkali bersifat kompleks, bervariasi dan tidak statis. Dalam situasi demikian, penyederhanaan dan reduksi kompleksitas kehidupan sosial ke dalam hubungan linier variabel-variabel dianggap tidak akan memberi manfaat, bahkan dapat memberikan informasi yang keliru. Dengan dasar demikian, penelitian ini lebih memilih menggunakan metode kualitatif agar dapat mengenali kenyataan yang kompleks itu. Penelitian kualitatif memberikan penekanan pada dinamika dan proses.

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan metode penelitian yang mencoba melakukan penelitian yang mendalam (*indepth study*) mengenai suatu kasus sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dan terorganisir dari kasus tersebut. Dalam studi kasus ini digunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), dengan pendekatan ini mengharuskan peneliti terlibat langsung di dalam masyarakat selama proses penelitian berlangsung. Artinya peneliti akan terlibat selama penelitian ini dilakukan di 5 kecamatan di Kabupaten Tuban.

#### c. Teknik pengumpulan data

- Focus Group Discussion (FGD)
- Wawancara mendalam
- Telaah Arsip dan Dokumentasi

#### d. Sumber Data

- Data primer yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan Kepala Dinas dan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban, Ketua kelompok nelayan masing-masing terutama yang berkaitan dengan CBM, Anggota kelompok nelayan, masyarakat yang bukan anggota kelompok nelayan, dan ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di wilayah pantai.
- Data sekunder yaitu arsip dan dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik kualitatif. Singarimbun (1999) menjelaskan analisis data deskriptif kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan mendeteksikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Pemikiran tersebut juga dijelaskan oleh Warsito (1993) yang menyebutkan menyebutkan penelitian deskriptif kualitatif terbatas pada

---

usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga merupakan penyingkapan fakta

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil survei terhadap 5 kecamatan dan mewakili usaha perikanan tangkap dan budidaya baik perikanan laut maupun tawar, menunjukkan bahwa masyarakat pesisir sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Permasalahan utamanya adalah kurangnya modal, kualitas sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kerusakan habitat laut (terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran laut dan sebagainya), kurangnya pemahaman terhadap nilai sumberdaya dan masalah kelembagaan (konflik pemanfaatan dan kewenangan masalah ketidakpastian hukum).

Sedangkan berdasarkan program pemberdayaan masyarakat pesisir secara berurutan prioritas program mencakup:

- a. Pemberdayaan masyarakat berbasis perikanan tangkap pada wilayah yang sudah terjadi over fishing
- b. Pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya pada wilayah yang sumberdaya lahannya terbatas
- c. Pemberdayaan masyarakat pada wilayah yang terjadi degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan
- d. Pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi dan pariwisata bahari
- e. Pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis perikanan tangkap pada wilayah yang sumberdayanya melimpah
- f. Pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya pada wilayah yang sumberdayanya masih tinggi.

Faktor keunggulan masyarakat pesisir adalah banyaknya masyarakat pesisir mulai dari nelayan, pengolah dan pedagang ikan yang berpotensi untuk dikembangkan baik dari sisi sosial ekonomi maupun social politik. Sedangkan kelemahannya adalah faktor peluang dalam kaitannya dengan pemberdayaan artinya masyarakat pesisir masih sangat tergantung dari peran pemerintah dalam upaya pemberdayaannya walaupun itu tidak menutup kemungkinan pihak lain khususnya bank BUMN maupun swasta.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam tahun pertama kegiatan, program pengelolaan berbasis masyarakat 5 kecamatan di Tuban memfokuskan programnya pada tiga pendekatan spesifik yakni:

- a. Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat tingkat-desa
- b. Rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis-masyarakat tingkat-desa
- c. Aturan-aturan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir berbasis-masyarakat tingkatdesa

Program-program di atas merupakan program pilihan (*voluntary program*) bagi masyarakat dan desa di wilayah pesisir dimana dalam pelaksanaannya bantuan teknis dan pendanaannya ditopang/dianggarkan oleh lembaga/instansi pemerintah kabupaten Tuban maupun propinsi Jawa Timur ataupun lewat swadaya dan usaha masyarakat/desa. Sedangkan tujuan, rencana pengelolaan dan pelaksanaan program ditentukan oleh masyarakat setempat berdasarkan dan mengikuti kebijakan/aturan/pedoman yang dibuat atau disepakati oleh pemerintah kabupaten setempat.

Secara umum pendekatan program berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Tuban dalam rangka menopang (*support*) masyarakat yang memanfaatkan sumberdayanya untuk memutuskan siapa yang akan memanfaatkan sumberdaya dan bagaimana memanfaatkannya, dan melaksanakan pilihan-pilihan pengelolaan yang mereka tetapkan.

Adapun kerangka kerja konsep (conceptual framework) proses perencanaan dan pelaksanaan berbasis-masyarakat di kabupaten Tuban secara ringkas mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

##### ***a. Identifikasi Isue***

Identifikasi masyarakat merupakan satu rangkaian kriteria ditetapkan dan dipakai untuk memperkirakan penerimaan secara cepat dan mudah metode/cara pemanfaatan sumberdaya yang

lestari dan juga dalam membangun kapasitas masyarakat dalam mengambil alih tanggungjawab pengelolaan. Kriteria tersebut antara lain:

- a. Tingkat tekanan atau derajat kerusakan sumberdaya akibat pemanfaatan yang tidak lestari (rendah/kecil)
- b. Ikatan sosial dan politik masyarakat (tinggi/kuat)
- c. Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya pesisir (tinggi)
- d. Kecenderungan masyarakat untuk konservasi sumberdaya (tinggi)
- e. Ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan dan tujuan proyek (tinggi)

Kriteria di atas dijadikan acuan untuk menentukan lokasi desa dimana model/contoh akan dicobakan selain kemudahan koordinasi, keragaman isu-isu utama dan keragaman kelompok etnis serta strategy diseminasi model/contoh. langkah berikutnya adalah:

a. Orientasi dan penyiapan masyarakat: Sebelum rancangan pengelolaan dibuat maka upaya awal perlu dilakukan untuk menerangkan dan menjelaskan tujuan proyek, proses yang akan dilalui, dan manfaat yang akan diperoleh kepada masyarakat. Keterlibatan dan hubungan yang terus-menerus dalam masyarakat sangat penting dan dilakukan dengan penempatan secara tetap pendamping masyarakat (penyuluh lapangan) dari orang di luar desa dan melibatkan seorang asisten/motivator desa dari masyarakat setempat. Tenaga

lapangan ini harus ditopang atau dibantu oleh tim teknis yang akan memberikan bantuan atau pelayanan teknis untuk isu-isu tertentu jika diperlukan. Orientasi dan penyiapan masyarakat ini diisi dengan berbagai kegiatan pendidikan lingkungan hidup (penyuluhan),

#### ***b. Persiapan Perencanaan***

Pilihan yang dikembangkan adalah kombinasi dari masukan dan usulan teknis dari staff teknis yang dipadukan dengan rekomendasi dan ide/pikiran dari masyarakat sendiri. Harus ada komitmen dan kesepakatan dari sebagian besar masyarakat sebelum kegiatan dan strategy ditetapkan untuk dilaksanakan. Untuk memulai rencana pengelolaan diperlukan kelompok inti yang merupakan perwakilan masyarakat yang akan merumuskan rencana pengelolaan tersebut. Sebelum kelompok inti ini bekerja mereka dibekali terlebih dahulu dengan pelatihan penyusunan rencana pengelolaan dan mencoba membuat draft rencana pengelolaan yang akan menjadi pemicu dan dasar diskusi konsultasi dengan masyarakat dan pemerintah desa. Hasil dari draft rencana pengelolaan ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat lewat pertemuan dan konsultasi baik secara formal dan informal untuk mendapatkan masukan, tambahan dan koreksi dari masyarakat, pemimpin formal dan informal, pemerintah desa dan stakeholder yang ada di desa. Pelaksanaan awal untuk mencoba prosedur dan struktur pengelolaan, dan membangun dukungan bagi rencana jangka panjang dan rencana yang menyeluruh dikembangkan dan diusulkan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan proyek seperti: penanaman bakau, pembuatan MCK, pengadaan air bersih, dan pembuatan tanggul; atau diusulkan oleh tim proyek dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan masyarakat seperti: pembersihan Bintang Laut Berduri (Crown of Thorns –CoTs), pembuatan daerah perlindungan laut, dan pembuatan pusat informasi.

#### ***c. Persetujuan Perencanaan dan Pendanaan***

Masyarakat menentukan prioritas isu dan tujuan bagi pengelolaan dan kegiatan. Penyuluh lapangan dapat menambahkan/ memberikan masukan, rekomendasi dan tambahan ide tetapi keputusan pilihan adalah hak dan tanggungjawab masyarakat. Proses penetapan dan kesepakatan diupayakan setelah ada konsensus dan dukungan dari mayoritas masyarakat. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan adil agar supaya dipahami oleh semua pihak bahwa proses penentuan/ pengambilan keputusan diketahui dan didukung oleh mayoritas masyarakat dan stakeholder. Rencana pengelolaan dan aturan lokal harus disepakati secara formal oleh unsur pemerintah dan kepala desa.

***Pengelolaan Potensi Sumberdaya Kelautan***  
***Shofwan, Khusaini dan Badriyah***

Aturan formal tersebut adalah dalam bentuk Keputusan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan wakil masyarakat melalui rapat musyawarah desa.

Sedangkan masalah pendanaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana pengelolaan, idealnya kegiatan tersebut membutuhkan bantuan dana, maka usulan dananya akan diintegrasikan dalam proses DIP/DUP yang diawali dengan rapat Musyawarah Pembangunan (Musbang) di desa dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di kecamatan sampai kabupaten yang kemudian dianggarkan dalam APBN/APBD. Sedangkan kegiatan yang tidak membutuhkan biaya yang besar dapat dilakukan secara swadaya masyarakat, lewat upaya yang sah dari masyarakat maupun lewat pendapatan asli desa

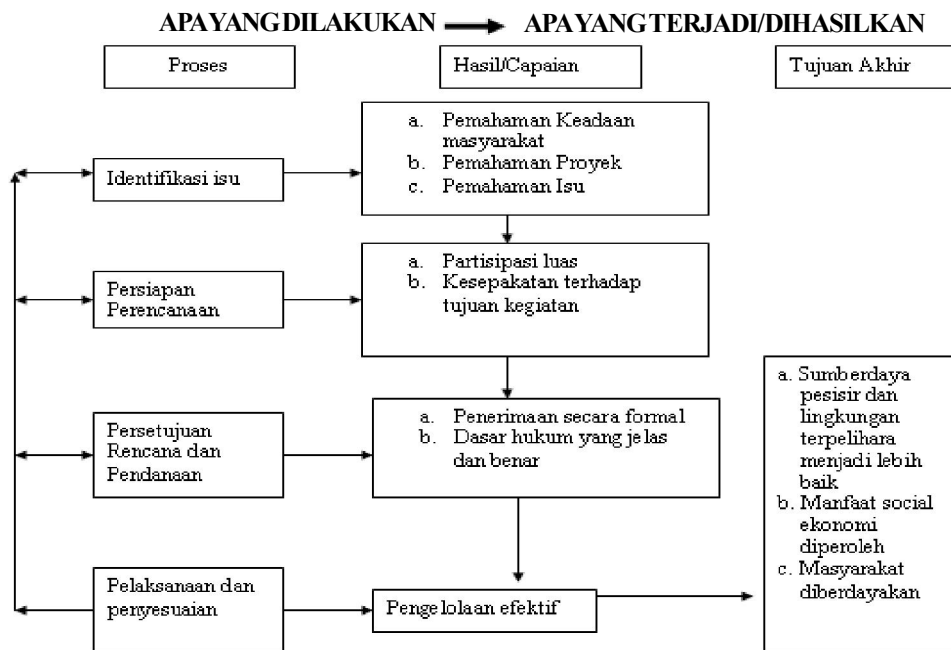
***d. Pelaksanaan dan Penyesuaian***

Pelaksanaan kegiatan sedapat mungkin dilaksanakan oleh masyarakat yang bertindak sebagai pengelola sumberdaya utama. Pendanaan dan bantuan teknis dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten/propinsi jika diperlukan. Apabila ada kegiatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat misalnya: pengaspalan jalan dan pembuatan sarana air bersih. Kegiatan dalam rencana pengelolaan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan perubahan yang terjadi di desa. Penyesuaian ini harus dilakukan secara terbuka dan atas persetujuan masyarakat dan kelompok pengelola bersama-sama dengan pemerintah desa.

***f. Monitoring dan Evaluasi***

Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan rencana pengelolaan ini dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk menilai kegiatan dan hasil capaian dari setiap kegiatan. Proses dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini telah diintegrasikan dalam dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan. Review tahunan dilaksanakan oleh masyarakat dengan atau tanpa bantuan atau dukungan pemerintah setempat, dan dilaksanakan sebelum siklus pendanaan tahun anggaran berikutnya dimulai sebagai masukan bagi rencana kegiatan tahunan berikutnya.

Berikut ini Alur dari Proses Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kabupaten tuban:



**Gambar 2. Model Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Masyarakat Pesisir Berbasis Masyarakat Di Tuban**



Kegiatan-kegiatan tersebut telah mendapatkan sejumlah besar produk (seperti laporan-laporan teknis, dokumen profil dan rencana pengelolaan, masyarakat dan staff pemerintah setempat yang telah dilatih dan seterusnya) dan yang lebih penting adalah hasil (*outcome*) yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan. Hasil-hasil antara yang penting yang diperoleh dan nyata di 5 kecamatan di kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai isu-isu pengelolaan pesisir dari masyarakat.
- b. Konsensus dan dukungan dari anggota masyarakat dan pemimpin mengenai isu-isu prioritas yang perlu segera dilaksanakan termasuk tujuan dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan dan mengembangkan potensi dan peluang.
- c. Perubahan perilaku menyangkut masyarakat dalam melindungi dan memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan sudah mulai nampak (misalnya menurunnya penggunaan bahan peledak dan racun, penambangan karang, perlindungan terumbu karang, dan penanaman kembali hutan mangrove)
- d. Menguatnya kapasitas masyarakat dan lembaga di tingkat desa dalam pengelolaan sumberdaya
- e. Dukungan pemerintah terhadap upaya perencanaan dan pengelolaan berbasis masyarakat dan bottom-up mulai dari desa, kabupaten dan propinsi

**Tabel 1. Hasil nyata di tiap Kecamatan di Kabupaten Tuban**

Palang	Tuban	Jenu	Tambakboyo	Bancar
Penghutan kembali Mangrove berjalan dengan baik	Berkurangnya banjir karena diperbaikinya kualitas tanggul	Ketersediaan air bersih semakin baik di desa lewat penambahan pipa dan konstruksi air bersih ke lingkungan penduduk	Distribusi dan supply air bersih diperbaiki	Kesehatan dan kebersihan masyarakat semakin baik lewat pengadaan MCK dan sumur gali.
Berkurangnya aktivitas pemboman ikan dan penambangan karang	Penambangan karang dan pasir sudah mulai dilarang untuk mencegah erosi	Sertifikat tanah sebanyak 220 telah diperoleh oleh masyarakat	Mata pencaharian tambahan lewat pengadaan motor katinting dan kerajinan tangan mulai dikembangkan	Meningkatnya kelimpahan dan spesies ikan di dalam Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Hasil dan kemajuan nyata diatas sudah nampak dan diperoleh walaupun rencana pengelolaan baru akan dilaksanakan tahun ini. Masih banyak upaya yang perlu dilakukan dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga di desa dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan. Mekanisme pengelolaan oleh masyarakat dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan di lapang masih akan dicoba sejalan dengan pelaksanaan rencana pengelolaan desa ini.

Diakui bahwa keberlanjutan pendekatan pengelolaan berbasis-masyarakat sebagaimana dihasilkan ini belum pasti karenanya dibutuhkan beberapa tahun lagi sebelum kita yakin bahwa model/ccontoh yang dikembangkan di kabupaten Tuban. Kemajuan dan hasil nyata juga telah diperoleh di tingkat propinsi dan kabupaten dalam melembagakan contoh pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis-masyarakat ini kedalam program pemerintah setempat.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerapan pengelolaan sumberdaya masyarakat pesisir berbasis masyarakat cukup efektif untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di wilayah pantai atau pesisir termasuk masyarakat baik yang berprofesi sebagai nelayan maupun yang bukan nelayan. Rasa memiliki masyarakat terhadap rencana pengelolaan merupakan hal yang penting dan membutuhkan partisipasi nyata dari masyarakat dalam tahap-tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Masyarakat desa di wilayah pesisir di 5 kecamatan kabupaten Tuban apabila dilatih dan diperkuat kemampuan dan kapasitas mereka serta diberi kepercayaan secara partisipatif akan mampu bertanggungjawab baik dalam mengelola sumberdana dan sumberdaya secara baik, mampu melakukan pemantauan/monitoring kondisi sumberdaya pesisir secara tepat serta dapat dirubah dari pemanfaat murni sumberdaya menjadi pengelola (*manager*) sumberdaya mereka sendiri.

Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat melaksanakan rencana pengelolaan harus mendapatkan perhatian serius dan penekanan utama selama proses persiapan, perencanaan, bahkan harus dilanjutkan sampai pada tahap pelaksanaan. Tanpa kapasitas yang cukup bagi pengelolaan maka kemungkinan keberhasilan secara berkelanjutan akan sulit dijamin. Rencana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat harus dipandang sebagai pendekatan pengelolaan bersama (*co-management*) atau secara kolaboratif dimana masyarakat dan pemerintah kabupaten secara aktif bekerjasama selama proses perencanaan dan pelaksanaan.

Partisipasi masyarakat akan sangat efektif apabila diintegrasikan sejak awal proses perencanaan bersamaan dengan keterlibatan aktif dari lembaga pemerintah. Dukungan dari pejabat pemerintah ditingkat kabupaten dan propinsi akan juga mempercepat kemungkinan keberhasilan program. Demikian juga di tingkat desa, dukungan yang kuat dari pemimpin setempat pada saat memulai proses perencanaan akan menjamin bahwa proses perencanaan tersebut berhasil dan mempercepat waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan rencana pengelolaan.

Dengan melihat hasil dari kesimpulan tersebut maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini termasuk beberapa hal berikut:

Untuk mencapai keberhasilan pendekatan berbasis-masyarakat hal yang penting adalah perlunya menempatkan secara tetap tenaga penyuluh lapangan yang berpengalaman dan terlatih yang akan memotivasi, mengkoordinasi, memfasilitasi dan melatih masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan berbasis-masyarakat di desa di 5 kecamatan tersebut.

Perhatian khusus dalam membangun kapasitas sumberdaya manusia untuk program-program berbasis-masyarakat perlu dilakukan sejak dari awal yang di barengi dengan pelatihan jangka pendek yang mampu diterima oleh masyarakat desa dapat dilaksanakan jika ada tenaga penyuluh lapangan yang mencurahkan waktu dan tenaganya secara penuh di desa.

Selain itu dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong desentralisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir untuk menjamin kualitas dan kelestarian sumberdaya wilayah pesisir dimana banyak penduduk miskin menggantungkan hidupnya sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bengen, D.G. 2000. *Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem dan Sumber daya Pesisir* (Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 13-18 November 2000. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB).
- \_\_\_\_\_. 2001. *Ekosistem dan Sumber daya Pesisir dan Laut Serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan* (Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 29 Oktober – 3 November 2001. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB).

- \_\_\_\_\_. 2002. *Sinopsis Ekosistem dan Sumber daya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB.
- Dahuri R., Rais Y., Putra S.,G., Sitepu, M.J., 2001. *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dahuri, R. et al. 1998. *“Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan yang Berakar dari Masyarakat”* Kerjasama Ditjen Bangda dengan Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan, IPB. Laporan Akhir.
- Departemen Kelautan dan Perikanan R.I., 2002. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. : Kep. 10/Men/2002 Tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*.
- Gordon, H.S., 1954. *The Economic Theory of a Common Property Resource. : the Fishery*, Journal of Political Economics, 62 (2): 124 – 142.
- Kusumastanto, T., 2002. *Reposisi “Ocean Policy” Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Di Era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah: Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, FPIK-IPB.
- Nugroho, dkk. 2001. *Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Berkelanjutan* (Peper Kelompok IV Mata Kuliah Falsafah Sain, IPB).
- Singarimbun, Masri, 1999. *Metodologi Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
- Surachmad, 1998. *Analisis Deskriptif Kualitatif*, Dian Karya, Bandung
- Susilo, S.B. 1999. *Perencanaan perikanan nasional dengan pendekatan model dan simulasi*. J. II. Pert. Indo. Vol. 8(2).
- Purwandari, E. Kristi. 1998, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Warsito, 1993. *Metode Kualitatif Menjawab Dinamika Persoalan*, CV Cipta Karya, Yogyakarta
- Zamani, N.P dan Darmawan, 2000. *Pengelolaan Sumber daya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*. Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 21 – 26 Februari 2000. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor.